



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK
KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

DENGAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGABINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUWUK**

NOMOR : W24.ED.UM.01.01-06f

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Luwuk yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. **YUGO INDRA WICAksi**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Luwuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- B. **Drs. MOH YORI NTOI**, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;

PIHAK I	PIHAK II



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04,10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Program Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini ialah :
 - a) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wargabinaan
 - b) Meningkatkan peran dan kemampuan wargabinaan
 - c) Memiliki bekal pengetahuan maupun keahlian yang berguna setelah menjalani masa pidana;

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama Ini terdiri dari :

- 1) Sosialisasi Kepemudaan
- 2) Pelatihan/ Bimbingan Teknis Kepemudaan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi maupun pelatihan keolahragaan.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan untuk kepentingan sosialisasi dan pelatihan keolahragaan.
- 3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan saat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keolahragaan.
- 4) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang dimaksud.
- 5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang di lakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan di musyawarahkan bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun periode 10 Januari s/d 31 Desember 2022 sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan akan dievaluasi setiap akhir tahun berjalan bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
✓	Ø

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kedua sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 7
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a) Bencana Alam;
 - b) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua} asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal perjanjian.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS KELAS IIB
LUWUK

YUGO INDRA WICAKSI, MM
NIP. 197507031998031006



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BANGGAI

Drs. MOH YORI NTOI
Nip. 196611011993031011

PIHAK I	PIHAK II